



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE KOTA TANGERANG SELATAN
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2020-2021
TANGGAL 3 DESEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak Lanjutan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 dari total 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi yang akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 37 kota yang akan menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota.

Pada dasarnya seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 mengharapkan penyelenggaraan Pemilihan berjalan lancar dan aman, sehingga menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Sejumlah hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 antara lain:

1. Perkembangan terakhir program KTP elektronik di wilayah Kota Tangerang Selatan, jumlah perekaman maupun pencetakan yang telah dilaksanakan, serta permasalahan yang saat ini tengah dihadapi dalam pelaksanaan program KTP-elektronik.
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk upaya yang dilakukan untuk memastikan agar setiap warga masyarakat tidak terkendala dalam menggunakan hak pilihnya.
3. Upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggaraan, peserta dan pemilih dalam pelaksanaan Pilkada

Serentak Lanjutan 2020 sesuai protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19.

4. Penerapan koordinasi seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini penyelenggara Pemilihan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta Gugus Tugas COVID-19, Polri dan aparat terkait dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020.
5. Pelaksanaan tahapan pemilihan yang sedang berjalan yaitu pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan calon wakil walikota yang dilakukan secara tatap muka maupun menggunakan media daring.
6. Penegakan disiplin dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Lanjutan 2020.
7. Hambatan dalam pelaksanaan Tupoksi pada persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 serta upaya untuk mengantisipasinya.

Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kantor KPU Kota Tangerang Selatan berjumlah 10 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Tim Yth. Bapak H. /Fraksi Partai Persatuan Pembangunan beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO.	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/F-PPP
2.	A-142	Dr. Junimart Girsang, S.H., Mba., M.H.	Anggota/F-PDI Perjuangan
3.	A-263	Komarudin Watubun, S.H., M.H.	Anggota/F-PDI Perjuangan
4.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/F-PDI Perjuangan
5.	A-186	Paryono, S.H., M.H.	Anggota/F-PDI Perjuangan
6.	A-152	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc	Anggota/F-PDI Perjuangan
7.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, Mba	Anggota/F-PG
8.	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota/F-Gerindra
9.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi.,M.Si.,MSc	Anggota/F-Gerindra
10.	A-366	Drs. H. Tjejep Muchtar Soleh, M.M	Anggota/F-Nasdem
11.	A-53	Edward Tannur, S.H.	Anggota/F-PKB
12.	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/F-PD
13.	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt	Anggota/F-PKS
14.	A-410	H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si	Anggota/F-PKS
15.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/F-PAN

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020. Komisi II DPR telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor KPU Kota Tangerang Selatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan legislatif.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Di dalam kunjungan spesifik ini Komisi II DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai seluruh persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020, antara lain persiapan data pemilih dan pemutakhiran data pemilih, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses refocusing dan realokasi dan penyesuaian kegiatan untuk memenuhi standar protokol kesehatan. Termasuk pelarangan pertemuan yang melibatkan masa pada tahap kampanye, pelaksanaan kewajiban menggunakan masker dan alat pelindung kesehatan selama Pilkada 2020 berlangsung sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU.

Selain itu Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada 2020, terutama sosialisasi melalui media daring. Termasuk penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan krusial pemilihan antara lain tahapan pemungutan suara, tahapan penetapan hasil, dan tahapan sengketa hasil. Kemudian juga soal penerapan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, atau penegakan hukum dengan mekanisme pemberian sanksi.

Pelaksanaan koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan seluruh pemangku kepentingan selama ini juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2020. Langkah-langkah mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS di masa pandemi juga menjadi masalah dan pekerjaan rumah KPU Kota Tangerang Selatan. Termasuk rencana dan kesiapan KPU Kota Tangerang Selatan menggunakan SIREKAP dalam pelaksanaan tahap rekapitulasi hasil perolehan suara, pembentukan badan adhoc, serta pembentukan KPPS di seluruh TPS.

B. Paparan KPU Kota Tangerang Selatan

Bahwa jumlah alokasi anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dialokasikan untuk KPU Kota Tangerang Selatan pada Pilkada 9 Desember 2020 antara lain pada tanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp.60.512.283.000,-. Pada tanggal 8 Juni 2020 adendum NPHD sebesar Rp.67.292.546.943,-. Hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam proses pencairan NPHD tersebut. Jumlah anggaran tambahan dari KPU RI yang bersumber dari APBN untuk menjalankan tahapan Pilkada dalam menerapkan protokol kesehatan sebesar Rp.23.886.336.000,-.

Terkait data pemilih dan pemutakhiran data pemilih, jumlah DPT yang ditetapkan KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 15 Oktober 2020 sebesar 976.019 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki sebesar 481.043 pemilih dan pemilih perempuan sebesar 494.976 pemilih. Jumlah DPS yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 September 2020 berjumlah 924.603 pemilih dan pemilih perempuan sebesar 468.978 pemilih. Bahwa terdapat kenaikan jumlah pemilih dari DPS menjadi DPT sebesar 51.417 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 25.419 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 25.998 pemilih.

Bahwa selama proses pemutakhiran data pemilih hasil Coklit daftar Pemilih Model A-KWK menjadi DPS terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) berjumlah 129.047 pemilih dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Kategori TMS	Jumlah
1.	Meninggal	19.920
2.	Ganda	6.305
3.	Di Bawah Umur	22
4.	Pindah Domisili	63.088
5.	Tidak Dikenal	28.671
6.	TNI	128
7.	Polri	263
8.	Hak Pilih Dicabut	0
9.	Bukan Penduduk	11.010
	TOTAL	129.407

Selama proses pemutakhiran data pemilih dalam DPS menjadi DPT terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) berjumlah 5.139 pemilih dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Kategori TMS	Jumlah
1.	Meninggal	777
2.	Ganda	286
3.	Di Bawah Umur	16
4.	Pindah Domisili	3.655
5.	Tidak Dikenal	29
6.	TNI	1
7.	Polri	0
8.	Hak Pilih Dicabut	0
9.	Bukan Penduduk	375
	TOTAL	5.139

Jumlah DP4 Yang Menjadi DPT Di Kota Tangerang Selatan

Bahwa DP4 yang diteruma KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 22 Februari 2020 berjumlah 965.699, dengan jumlah pemilih laki-laki sebesar 476.211 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 489.488 pemilih. Jumlah DPT hasil sinkronisasi pada tanggal 23 Maret 2020 berjumlah 1.056.410 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 522.962 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 533.448 pemilih.

Bahwa jumlah DP4 Tambahan pasca penundaan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang diterima oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada 24 Juni 2020 berjumlah 2.648 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki 1.352 pemilih dan pemilih perempuan 1.296 pemilih. Selanjutnya KPU Kota Tangerang Selatan melakukan pencermatan data pemilih tersebut dan menyusun Daftar Pemilih (Model A-KWK) yang akan digunakan sebagai bahan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berjumlah 1.038.662 pemilih, pemilih laki-laki 513.650 pemilih, pemilih perempuan 525.012 pemilih.

DPT Pilkada 2020 Kota Tangerang Selatan sebesar 976.019 bersumber dari:

- DPT Pemilu 2019 sebesar 849.681 pemilih atau sebesar 87,06% dari DPT Pilkada 2020;
- tanggapan masyarakat sebesar 9.033 pemilih atau sebesar 0,93% dari DPT Pilkada 2020;
- DP4 berjumlah 117.305 atau sebesar 12,02% dari DPT Pilkada 2020.

Jumlah Daftar Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Menggunakan KTP-El Di Setiap TPS Di Kota Tangerang Selatan

- Daftar Pemilih yang diturunkan oleh KPU RI yang selanjutnya disusun menjadi Model A-KWK oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk menjadi bahan PPDP untuk Coklit merupakan data hasil sinkronisasi antaradata DPT Pemilu 2019, DPK Pemilu 2019 dan DP4 Pilkada 2020 yang dilakukan oleh KPU RI;
- Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu 2019 sebesar 45.392 pemilih, jumlah pemilih laki-laki 20.716 pemilih dan pemilih perempuan 24.676 pemilih;
- Oleh karena terjadinya irisan data akibat hasil sinkronisasi data tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan tidak dapat mengidentifikasi secara pasti, karena data DPK tersebut juga beririsan dengan DP4 Pilkada 2020.

Kendala Dan Tanggapan Masyarakat Dan Peserta Pilkada Ketika DPS Menjadi DPT

Selama penyusunan DPS menjadi DPT, terdapat masukan dan tanggapan, baik dari unsur Bawaslu dan jajarannya, peserta Pilkada, ataupun dari masyarakat. Tanggapan tersebut berupa tanggapan terhadap pemilih yang belum terdaftar ke dalam DPS, pemilih yang statusnya sudah TMS tapi masih terdaftar dalam DPS, dan terhadap pemilih yang terdapat kekeliruan pencatatan elemen data pemilih. Tetapi semua berjalan dengan sangat baik, tidak terdapat kendala.

Antisipasi Penggunaan Surat Keterangan Penduduk Dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020

- Penggunaan Surat Keterangan (Suket) dalam Pilkada diatur dalam Peraturan KPU No. 19 Tahun 2019 ketika mendaftar masyarakat sebagai pemilih, serta pula dalam PKPU No. 18

Tahun 2020 dalam hal pemilihan akan menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara.

- Hasil koordinasi antara KPU Kota Tangerang Selatan, bahwa informasi yang diterima yaitu Disdukcapil tidak akan menerbitkan Suket karena masih tersedianya blanko KTP-el dan penerbitan Suket sudah ditiadakan.
- Tetapi berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/12877/Dukcapil tanggal 26 November 2020 perihal Rekam Cetak KTP-el dan Suket telah merekam dalam rangka mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020 pada angka 2 Huruf (b) disebutkan bahwa “bagi wajib KTP-el yang proses penunggalan datanya belum berstatus Print Ready Record (PRR) atau waktu pelayanan setempat sudah habis (kantor sudah akan tutup) atau terdapat kendala teknis lainnya sehingga KTP-el tidak bisa dicetak, maka Kadis Dukcapil dapat mengambil langkah diskresi untuk mencetak Suket Telah Merekam KTP-el (Suket).

Sosialisasi rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder pemilihan antara lain peserta pemilihan, Bawaslu, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya, dengan model pertemuan tatap muka di 54 kelurahan sebagai langkah tindak lanjut KPU Kota Tangerang Selatan terkait Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KPU Kota Tangerang Selatan memberikan pemahaman terkait pelarangan pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain melalui Surat Edaran dan rapat bersama LO Paslon peserta pemilihan.

Selain itu KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan tahapan dengan menggunakan protokol Covid-19 serta ditegaskan lagi dalam setiap pertemuan rapat tatap muka dengan peserta yang tidak lebih dari 25 orang, untuk selalu menggunakan protokol Covid-19 sekurang-kurangnya menggunakan masker.

Selain sosialisasi menggunakan metode tatap muka, KPU Kota Tangerang Selatan melakukan sosialisasi melalui media daring kepada stakeholder pemilihan, sosialisasi dalam bentuk perlombaan, sosialisasi dalam bentuk Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan bahan sosialisasi, serta membuat media informasi website <https://sipangsi.id/>

Tahapan pemilihan yang berpotensi terjadinya pelanggaran terutama terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 antara lain tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tahapan penetapan hasil Pilkada 2020 dan tahapan penyelesaian sengketa hasil. Selama ini tidak ada permasalahan dalam penerapan protokol Covid-19 karena semua berjalan sesuai juknis dan surat edaran dari KPU RI. Sejauh ini belum ada pelanggaran penerapan protokol kesehatan Covid-19 karena sebelumnya telah diberikan pembekalan dan dipertegas melalui PKPU No. 13 tahun 2020.

Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai protokol kesehatan Covid-19 dilaksanakan dengan baik melalui rapat koordinasi maupun kunjungan ke pihak eksternal dalam rangka koordinasi dan menghadiri undangan. Untuk memastikan pemilih datang ke TPS pada hari pemungutan suara, KPU Kota Tangerang Selatan mengingatkan warga pemilih melalui pengumuman melalui DKM Masjid se-Kota Tangerang Selatan.

KPU Kota Tangerang Selatan juga melakukan persiapan terkait rencana penggunaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2020 antara lain:

- Disampaikan kepada KPPS untuk SDM KPPS 2 orang diantaranya wajib ada calon KPPS yang terbiasa menggunakan gadget;
- Melakukan inventarisir dataa yang dibutuhkan untuk dilakukan aktivasi database diantaranya nama, NIK, nomor telepon dan email;
- Melakukan simulasi perwakilan 2 kali, salah satunya di acara Hotel Marilyn dengan contoh 12 TPS dari 4 kelurahan, 2 kecamatan;
- Tanggal 29 November 2020 s.d 30 November 2020 diadakan simulasi pengenalan kepada seluruh anggota KPPS operator Sirekap;
- Tanggal 5 Desember 2020 diadakan finalisasi penginstalan dan aktivasi Sirekap mobile.

Jumlah TPS di Kota Tangerang Selatan berdasarkan penetapan DPT KPU Kota Tangerang Selatan sebesar 2.963 TPS. Terkait logistik khusus untuk penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi Covid-19, KPU Kota Tangerang Selatan telah menerima perlengkapan dalam rangka penerapan protokol Covid-19 seperti peralatan rapid test untuk penyelenggara pemilihan, termasuk masker, handsanitizer, dan alat pelindung diri (APD).

Logistik

Logistik dan APD sudah hampir semua, thermogun baru hadir dua hari lalu, wilayah Banten sudah menerima *thermogun*, Surat suara di aula kecamatan ada kekurangan surat suara. Surat suara, surat suara cadangan, karet pengikat surat suara, tinta, pipet tinta, alat bantu coblos, alat bantu coblos tuna netra, sampul untuk surat suara sah, tidak sah dan tidak digunakan, sampul model A1, A4 daftar hadir, model C daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan, model C hasil salinan, model C hasil plano dan model C kejadian khusus. Model C belum ada di Tangsel sudah dicetak di percetakan negara. Logistik sudah ada di aula kecamatan dilakukan pengesetan, logistik diluar kota, penghapus cair. APD sudah lengkap semua, hazmat, disinfektan, masker, ember cuci tangan, sarung tangan plastik, sarung tangan lateks/karet.

C. PAPARAN BAWASLU KOTA TANGERANG

Sumber daya manusa jajaran pengawas pemilihan se-kota Tangerang Selatan pada Pilkada Serentak Lanjutan 2020: Bawaslu Kota 27 orang, Panwaslu Kecamatan 21 orang, Panwaslu

Kelurahan 54 orang, Pengawas TPS 2.963 orang. Total Jumlah DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebesar 976.019 pemilih. Realisasi anggaran Bawaslu Kota Tangerang Selatan:

PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE SISA ANGGARAN
12,929,537,000	7,174,232,724	55.49%	5,755,304,276	44.51%

Pengawasan Logistik APD

Masker, jumlah kebutuhan 8.889 buah jumlah yang tersedia 8.197 buah. Thermogun jumlah kebutuhan 2.963 buah jumlah yang tersedia 2.963 buah. Faceshield jumlah kebutuhan 26.667 buah jumlah yang tersedia 27.047 buah. Handsanitizer jumlah kebutuhan 5.926 botol jumlah yang tersedia 6.015 botol. Sarung tangan jumlah kebutuhan 20.083 box jumlah yang tersedia 2.997 box. Perlengkapan Hazmat suite jumlah kebutuhan 2.963 buah jumlah tersedia 2.963 buah.

Pengawasan Logistik Kelengkapan Pemungutan Suara

Surat Suara jumlah kebutuhan 1.001.874 jumlah tersedia 1.003.874. Bilik Suara jumlah kebutuhan 8.889 jumlah tersedia 8.889. Kotak Suara jumlah kebutuhan 2.963 jumlah tersedia 2.963. Formulir C1 Plano jumlah kebutuhan 2.963 jumlah tersedia 0. Formulir C1 Lampiran jumlah kebutuhan 2.963 jumlah tersedua 0. Formulir C6 jumlah kebutuhan 2.963 jumlah tersedia 0.

Pengawasan Laporan Dana Kampanye

- Paslon Nomor Urut 1 Drs. H. Muhamad, MSi dan Rahayu Sraswati, DD, total Rp.1.366.500.000,-
- Paslon Nomor Urut 2 Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H.,Hum dan H. Ruhmaben, total Rp.1.300.000.000,-
- Paslon Nomor Urut 3 Drs. H. Benyamin Davine dan H. Pilar Saga Ichsan, S.T. total Rp.1.050.000.000,-

Laporan Penanganan Pelanggaran jumlah temuan 11, jumlah laporan 58, total 69, tidak diregister 21, registrasi 48.

Temuan Penanganan Pelanggaran administrasi 7, pidana 1, kode etik 0, bukan pelanggaran dihentikan 19, pelanggaran undang-undang lainnya 15. Jumlah total 42.

Apa yang telah dilakukan di proses pengawasan dalam tahapan pilkada tangsel baik dari segi pengawasan proses kampanye dan pelaksanaan proses penghitungan suara, di bawaslu melakukan protokol kesehatan dan sudah mengadakan rapid. 176 orang reaktif. Menyediakan face shield, hand sanitizer, baju hazmat

Panwascam, besok pengawas TPS sudah mulai bekerja 5-6 hari menjelang pemungutan suara, karena KPU sudah mulai membagikan C6

Dugaan pelanggaran yang masuk ke bawaslu Kota Tangsel, 69 pelanggaran baik temuan maupun laporan. 21 pelanggaran yang tidak diproses tidak diregistrasi, dana kampanye di kota Tangsel masih relatif kecil. Masih 1 milyaran, diharapkan pada saat pelaporan akhir meningkat. Yang paling banyak melakukan tatap muka paling banyak Paslon No. 2 :1508 kali, Paslon No. 1: 176, Paslon No. 3: 829, yang melakukan daring hanya Paslon No. 1.

D. Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI

Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.

Pilkada saat ini bertepatan dengan pandemi covid, bagaimana dengan APD dan bagaimana dengan orang yang positif terkena covid? Bagaimana keadaan pada saat tatap muka dilakukan? Laksanakan protokol kesehatan secara ketat. KPU Logistik sudah ada di gudang PPK Tanggal 7 didorong dari PPK ke TPS, kesiapan KPU dalam Pilkada Tangsel: sudah siap 100 persen. Masih ada kertas suara yang belum siap 1000, sudah dijemput di Gresik, yang menjemput tiba hari ini.

Sisa perekaman tinggal 29 orang. Sudah menyurati ke warga, tinggal kemauan pemilih yang belum hadir untuk melakukan perekaman. Buku panduan tidak perlu masuk ke dalam rumah untuk verifikasi kk (coklit). Tidak ada konfirmasi dari PPK dan PPS yang terpapar covid. Agustus – November mengadakan sosialisasi prokes agar pemilih tidak khawatir datang ke tps basis sosialisasi di kelurahan.

Netralitas penyelenggara hasil analisis dan penelusuran di tingkat ad hoc khususnya TPS 280 TPS direkomendasikan ke KPU apakah benar terafiliasi dengan salah satu paslon, atau lokasi TPS berdekatan dengan salah satu kediaman paslon. Prokes ada 9 yang melanggar paslon . Pertemuan tatap muka dengan tidak menggunakan masker dan tidak menyediakan hand sanitizer, peserta lebih dari 50 orang dan tidak menjaga jarak, peserta lebih dari 50 orang dan tidak menjaga jarak serta tidak ada hand sanitizer.

Kualitas gakkumdu lebih baik, money politik Gakumdu fokus pada laporan. Ada beberapa kasus yang didiskusikan dan klarifikasi. Tahapan pengawasan, H-5 cukup krusial terkait undangan memilih, terhadap penyelenggara yang tidak netral kami memerintahkan kepada Panwas TPS untuk mengawasi pembagian undangan pemilihan.

Sebanyak 29 orang yang belum melakukan perekaman KTP, rekomendasi terhadap 1.158 orang yang MS namun belum masuk DPT. Apabila terdapat 29 orang yang tersisa, namun surat suara tidak ada. Ini menjadi perhatian, orang di satu sisi didorong melakukan perekaman KTP namun tidak menyediakan surat suara.

Meminta rekomendasi kepada Komisi 2, panwas TPS harus dirapid, KPPS dirapid, Saksi di aturan KPU tidak ada rapid untuk saksi, kalau bisa dari Komisi 2 bisa memberikan catatan untuk dirapid. Saran jangan dihambat 1.100 pemilih, selama ini yang datang ke TPS hanya 50-60

pemilih yang datang. Jangan terlalu kaku, pemilihan adalah persoalan menggunakan hak, bukan kewajiban.

Ir. Hugua

Tanggal 5 Desember close untuk kampanye, hampir seluruh kontestan show of force, penyiasaan akan terjadi. Sikap Komisi 2 terhadap pelaksanaan Pilkada 2020, Kemendagri berhasil meyakinkan kami. Jangan sampai Pilkada menjadi eskalasi baru, implikasi dampak adalah 2-3 minggu setelah Pilkada. Bawaslu ekstra keras pada H-5 dan pada hari H nanti. Soal logistik saya percaya di Tangsel.

Ada persoalan Saksi yang tidak ada ketentuan dirapid, Kemendagri membuat surat edaran untuk melakukan rapid test di Puskesmas. Otonomi daerah memungkinkan, dan ada anggaran di Puskesmas, tapi KPU dan Bawaslu pro aktif berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.

Note Sekretariat:

Berkirim surat ke Kemendagri untuk membuat Surat Edaran pelaksanaan rapid test kepada Saksi di TPS ke Puskesmas setempat.

Menerima data warga yang terkena covid, dan pemilih yang sedang isolasi mandiri agar bisa berperan aktif dan tidak kehilangan hak pilihnya.

Edward Tannur, S.H.

Pemilih berdasarkan data pemilih atau berdasarkan KTP, apakah undangan C6 ada pengawasan dari Panwas. Banyak masyarakat tidak mematuhi protokol Covid-19. Ada yang berbeda dibanding sebelumnya, ada catatan pemilih membawa masker alat tulis pribadi dan membawa identitas diri berupa KTP-el. C Pemberitahuan sesuai dengan KTP. Dibagi jamnya, sudah mesosialisasikan kalau ada pemilih yang datang tidak sesuai jam nya tetap dilayani oleh Petugas TPS. Tahapan selain mencuci tangan dengan air mengalir, kalau suhu tubuh diatas 37,3 ada bilik khusus. Mendorong masyarakat yang ada dalam DPT apakah sudah memiliki e KTP

III. CATATAN RAPAT

1. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan pada tahap pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Lanjutan tanggal 9 Desember 2020 telah mempersiapkan dengan baik mekanisme yang dapat mempermudah proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS. Selain kesiapan infrastruktur penyelenggara di TPS, KPU juga telah mempersiapkan sumberdaya manusia, melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada penyelenggara yang akan memanfaatkan aplikasi Sirekap secara berjenjang.

2. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan memiliki sejumlah catatan hasil pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan antara lain terkait pelaksanaan tahapan kampanye, serta pelanggaran dan penyelesaiannya.
3. Bahwa terkait dengan penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 oleh peserta atau penyelenggara, KPU dan Bawaslu di Kota Tangerang Selatan akan bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 3 Desember 2020. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2020
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M